

## LAMPIRAN

### Transkrip Wawancara dengan Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional

#### Badan Kesbangpol Jateng

1.	Pertanyaan	:	Apa saja program-program Anti Radikalisme dari Badan Kesbangpol Jateng?
	Jawaban		<p>Menurut Prepres 7 2021 RAN PE, Kewenangan Pemda ada di Kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan terdiri dari Pencegahan, Kontra Radikalisme dan Deradikalisasi. 3 aspek ini menjadi perannya Kesbangpol di Daerah. Peran Kesbangpol dalam melaksanakan program-program ini untuk tahun 2022 ada Program Penguatan Deradikalisasi untuk eks napiter di Jawa Tengah. Kenapa mengambil Deradikalisasi karena di Jawa Tengah ada 260 eks napiter, mayoritas di karesidenan Surakarta, sisanya di Boyolali, Klaten, Wonogiri, Karanganyar, dan Sukoharjo, itu 143 eks napiter. Program Deradikalisasi ada SK dari Gubernur yang dimana dibentuk Tim Terpadu Deradikalisasi Jawa Tengah yang terbagi menjadi 3 tim diantaranya Wawasan Kebangsaan, Wawasan Keagamaan, dan Kewirausahaan.</p> <p>Kesbangpol bekerjasama dengan OPD-OPD terkait secara vertikal maupun horizontal termasuk Ormas yang ada di Jawa Tengah. Misalkan dalam Pokja Wawasan Kebangsaan, program-program yang dijalankan adalah peningkatan Wawasan Kebangsaan kepada mitra-mitra Deradikalsiasi atau eks napiter contohnya eks napiter dilibatkan dalam upacara nasional, hari bela negara, dll. Diikutkan juga dalam sosialisasi Pancasila. Mereka diikutkan supaya dapat memiliki dan meningkatkan rasa nasionalisme. Eks napiter yang kategori hijau atau sudah bisa berbaur dengan masyarakat diajak menjadi narasumber untuk menceritakan kenapa mereka bisa menjadi radikal, alasannya apa dan sebagainya. Program-program ini ditujukan untuk Ormas, Pemuda, Ibu PKK dan lainnya. Di Pokja Kewirausahaan mereka diajak supaya eks napiter bisa berdaya secara ekonomi. Salah satu faktor</p>

		<p>mereka bisa menjadi radikal karena faktor ekonomi. Asesmen dilakukan untuk mengetahui kebutuhan dari para peserta program/kegiatan, dalam hal ini eks napiter supaya bisa diberikan pelatihan. Di tahun 2022, Kesbangpol pernah melaksanakan Workshop Kewirausahaan yakni Digital Marketing, lalu juga diberikan alat peracik kopi kepada eks napiter. Program ini juga diikuti oleh kelompok tani di Temanggung contohnya. Pada sisi Wawasan Keagamaan dilakukan sosialisasi melibatkan peran tokoh agama agar ada moderasi beragama kepada eks napiter. Walaupun radikalisme secara fisik sudah tidak ada karena eks napiter sudah kembali ke NKRI, tetapi Radikalisme secara pemikiran/ide masih ada, maka dari itu harus bisa dilawan melalui moderasi sisi keagamaan.</p> <p>Ada pergeseran pola kegiatan Kesbangpol Jateng terutama terkait Radikalisme. Di tahun 2020, 2021 hingga medio 2022, Kesbangpol fokus terhadap Deradikalisasi. Deradikalisasi artinya mengembalikan ideologi-ideologi masyarakat yang tadinya terpapar menjadi tidak terpapar atau hilang. Namun di pola Deradikalisasi itu sudah ada banyak organisasi lain yang bekerja disitu. Contohnya BNPT dengan Sub Direktorat Deradikalisasi dan Sub-sub Direktorat Wilayah. Densus pun juga sama seperti itu. Ketika Kesbangpol dan Pemerintah Provinsi ikut dalam deradikalisasi maka semakin menumpuk lembaga yang menanganinya. Sebagai contoh, seorang eks napiter atau seorang individu bisa didampingi oleh berbagai macam pihak. Ia bisa menjadi klien Bapas (Badan Permasyarakatan), Klien BNPT, Klien Densus juga Klien Pemprov.</p> <p>Di tahun 2022, Kesbangpol mulai bergeser pada Program Kontra Radikalisasi/Radikalisme dengan adanya Pergub No. 35 Tahun 2022. Kesbangpol bertugas atau menugaskan diri pada pencegahan melalui pola-pola sosialisasi, melalui media sosial, melalui pendekatan pada tokoh-tokoh masyarakat dan pemuda dengan membumikan Pancasila kembali. Walaupun tidak memungkiri/tidak menutup kemungkinan bahwa Kesbangpol dapat turun ke lapangan bersama lembaga-lembaga lain seperti Densus dan BNPT karena itu tetap berjalan tetapi Kesbangpol tidak berfokus semua pada Deradikalisasi.</p>
--	--	---

			<p>Karena pola Deradikalisasi itu ekuivalen dengan pola-pola pemberian bantuan, karena biasanya eks-eks Napiter ketika sudah keluar dari penjara adalah bagaimana mereka bisa menghidupi keluarganya atau mencari mata pencaharian. Kemudian teman-teman dari kementerian atau lembaga memberikan modal atau bantuan hidup. Karena ketika Pemerintah Provinsi ikut seperti itu maka dikhawatirkan adalah tidak tepat sasaran, untuk itu kesbangpol lebih condong menjadi regulator. Dalam artian Kesbangpol menerapkan pola-pola pencegahan, asesmen terhadap eks Napiter dan termasuk inisiasi untuk penambahan kurikulum muatan lokal kepada pelajar di satuan-satuan pendidikan dibawah kewenangan Provinsi.</p>
2.	Pertanyaan	:	Apakah program-program tersebut dilaksanakan secara berkala?
	Jawaban		<p>Program-Program Anti Radikalisme dilaksanakan secara berkala karena tercantum di RPJMD. Gubernur juga memiliki atensi terhadap kontra radikalisme di Jawa Tengah. Di tahun 2022, sudah dilaksanakan 10 kali dari Program Annti Radikalisme (dalam artian Deradikalisasi) dan di tahun 2023 sudah 5 kali melaksanakan Program Anti Radikalisme (dalam artian Kontra Radikalisme/Radikalisasi). Dalam setiap pelaksanaan Program Anti Radikalisme selalu diselipkan narasi/pesan-pesan untuk meningkatkan toleransi dan Wawasan Kebangsaan demi melawan narasi radikalisme.</p>
3.	Pertanyaan	:	Bagaimana cara atau mekanisme dari program-program tersebut dilaksanakan?
	Jawaban		<p>Radikalisme itu termasuk <i>extraordinary crime</i>, yang berarti kejadian yang sangat luar biasa. Tentunya dalam pelaksanaan program, strategi yang dilakukan juga strategi yang luar biasa, di Jawa Tengah, pelaksanaan Program Anti Radikalisme dilakukan dengan bergotong royong/bekerjasama dengan instansi-instantansi terkait seperti Densus, BNPT, FKPT, FKDM, FKUB, dan beberapa OPD terkait. Mereka semua dilibatkan karena termasuk pada Pokja Tim Radikalisme. Penyebarluasan informasi akan program maupun pelaksanaan program dilakukan dengan berbagai macam cara.</p> <p>Asesmen sangat dibutuhkan karena bertujuan untuk mengetahui keperluan atau kebutuhan dari eks napiter atau orang-orang yang terpengaruh Radikalisme.</p>

			<p>Kesbangpol Jateng juga memiliki Program Sindikasi Konten Positif untuk melawan narasi-narasi radikal yang ada di media sosial melalui konten-konten dengan melibatkan Humas-Humas yang ada di OPD Jawa Tengah, lalu kalangan pemuda atau ormas di Jawa Tengah.</p> <p>Dengan adanya Sindikasi Konten Positif ini para pemuda atau ormas bisa menyampaikan narasi-narasi positif yang ada di media sosial, karena faktanya narasi radikalisme menyebar melalui media sosial seperti IG, Twitter, Facebook, dan lain-lain yang harus di waspadai. Cara penyebarluasan dari informasi kegiatan dan pelaksanaan kegiatan melalui OPD terkait maupun ormas-ormas di Jawa Tengah.</p>
4.	Pertanyaan	:	Siapa saja target atau audiens dari program-program Anti Radikalisme Badan Kesbangpol Jateng?
	Jawaban		<p>Masyarakat umum menjadi target peserta/audiens Program-Program Anti Radikalisme yang dilaksanakan Kesbangpol Jateng. Dalam melaksanakan Deradikalisasi, masyarakat umum bukan utama tetapi orang-orang yang sudah terpapar radikalisme seperti eks napiter dan returnis yang berasal dari Suriah, Turki dan negara-negara lainnya.</p> <p>Untuk masyarakat umum dilakukan pencegahan ekstrimisme dengan Kegiatan Kontra Radikalisme/Anti Radikalisme supaya ideologi radikalisme tidak menyebar kepada lingkungan dan masyarakat disekitar. Sebagai contoh ketika suatu daerah memiliki tingkat kerawanan daerah yang tinggi maka dilakukan penguatan melalui ideologi pancasila maupun toleransinya. Di Jawa Tengah ada Program Sekolah Damai yang berarti Sekolah Pro Toleransi dan Anti Kekerasan yang bertujuan membentengi para siswa/pelajar di Jateng agar tidak terpapar ideologi radikal.</p>
5.	Pertanyaan	:	Apakah ada target jumlah peserta ataupun audiens dari program-program Anti Radikalisme Badan Kesbangpol Jateng?
	Jawaban		Untuk jumlah peserta, Kesbangpol Jateng tidak membatasi, tetapi dalam program sosialisasi biasanya per program itu 50 orang yang mengikuti. Dalam program/kegiatan ini diundang tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda dalam artian tokoh-tokoh yang berpengaruh di lingkungannya sehingga dapat

			<p>memberikan snowball effect, karena dari tokoh-tokoh ini, mereka dapat menyebarkan narasi-narasi positif kepada orang disekitar ataupun lingkungannya.</p> <p>Walaupun yang diundang tidak banyak tetapi mereka memiliki penokohan/ketokohan sehingga narasi-narasi positif mereka dengarkan dan sebarakan. Termasuk juga <i>influencer</i> diikutsertakan supaya jangkauannya lebih luas. Sosmed juga digunakan untuk menjangkau khalayak yang lebih luas. Program-program ini bisa disebarakan melalui youtube dan zoom.</p>
6.	Pertanyaan	:	Siapa saja pihak-pihak yang diikutsertakan Badan Kesbangpol Jateng untuk melaksanakan program-program anti radikalisme?
	Jawaban		Ini tergantung Tupoksi dari masing-masing lembaga/Instansi karena setiap lembaga punya perannya masing-masing. Seperti Densus perannya lebih vital di sisi penindakan. Untuk tindakan pencegahan atau pelaksanaan sosialisasi, peran Kesbangpol Jateng lebih dominan. Untuk lingkup OPD di Jateng, <i>leading sector</i> dari Program Anti Radikalisme ada di Badan Kesbangpol Jateng.
7.	Pertanyaan	:	Apakah ada lokasi khusus untuk melaksanakan program-program anti radikalisme?
	Jawaban		Untuk lokasi pelaksanaan Program-Program Anti Radikalisme hampir seluruh daerah di Prov Jateng. Dalam penentuan lokasi terdapat keterbatasan anggaran sehingga dalam menentukan lokasi, lokasi tersebut harus mempunyai efek untuk dampak yang lebih besar. Sebagai contoh Solo Raya termasuk daerah yang sangat rawan karena banyak eks napiter disana, sehingga porsi kegiatan lebih besar disana timbang daerah-daerah lain yang kerawanannya masih cukup rendah.
8.	Pertanyaan	:	Dari tahun ke tahun apakah ada tema khusus terkait program-program anti radikalisme?
	Jawaban		Tema menyesuaikan dengan kebutuhan program, tetapi secara garis besar tema yang diangkat adalah Penguatan Kontra Radikalisme bagi Masyarakat di Jawa Tengah.
9.	Pertanyaan	:	Apakah dengan peningkatan anggaran pada APBD Badan Kesbangpol Jateng mempengaruhi program kerja yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Jateng khususnya terkait Program Kerja Anti Radikalisme?
	Jawaban		Sebetulnya Program Anti Radikalisme itu sudah dimulai/dilaksanakan Kesbangpol Jateng cukup lama, tidak hanya di tahun 2022 ataupun di tahun 2020. Sebelum itu Kesbangpol Jateng sudah melakukan

		<p>Kegiatan Anti Radikalisme secara insidental seperti kunjungan kepada eks Napiter maupun kunjungan kepada anak dan keluarga-keluarga ataupun masyarakat yang dianggap menyimpang itu dilakukan kunjungan dengan konseling agar tidak semakin parah menyimpangnya. Di tahun 2021, Perpres No. 7 Tahun 2021 muncul dan seminggu sebelumnya sudah ada SK Gubernur Nomor 048/04 tentang Tim Terpadu Penanganan Deradikalisme/Deradikalisasi bagi eks Napiter di Jawa Tengah.</p> <p>Hubungannya apakah dengan adanya Pergub No. 35 Tahun 2022 dengan kenaikan APBD Provinsi Jawa Tengah terkait Radikalisme menjadi naik anggarannya sebenarnya tidak ada hubungannya secara langsung, secara langsung tidak ada. Artinya ketika Kesbangpol mengajukan anggaran itu berdasar kan pada kegiatan berdasar pada capaian yang ingin dicapai. Karena dengan adanya Perpres No.7 Tahun 2021 maka masyarakat dan lembaga pemerintah semakin aware/sadar akan Radikalisme dan Terorisme yang merupakan sebuah <i>Extraordinary Crime</i> yang bisa dan harus dicegah. Dengan adanya atau tidak adanya Pergub itu tidak akan berpengaruh dengan kinerja Kesbangpol. Sedari awal Kepala Badan Kesbangpol sudah mencanangkan bahwa Terorisme di Jawa Tengah harus dicegah dan angkaanya harus diturunkan. Maka dengan target seperti itu, Badan Kesbangpol mencoba mengajukan berbagai macam program/kegiatan yang berimbang pada kenaikan anggaran dan kebetulan didukung oleh Perpres No.7 Tahun 2021 dan itupun faktor penguat. Adanya Pergub No. 35 Tahun 2022 itu diinisiasi oleh NGO. Untuk Kesbangpol Jateng, ada atau tidak adanya peraturan/kebijakan yang memayungi itu tetap harus bergerak dan bekerja sesuai dengan amanat Undang-Undang yang lebih tinggi yakni Pepres No. 7 Tahun 2021.</p> <p>Kemudian apakah dengan adanya peningkatan anggaran berpengaruh pada kinerja tentunya iya tapi itu bukan suatu hal yang mutlak karena pencegahan dan penanggulangan Radikalisme serta Ekstremisme di Jawa Tengah bukan hanya beban atau tanggung jawab dari pemerintah. Dari awal tahun 2020, Kesbangpol Jateng mulai <i>concern</i>/sadar pada hal tersebut dan Kesbangpol kerjasama dengan lintas pihak/pihak-pihak</p>
--	--	---

		<p>lain. Banyak <i>stakeholders</i> yang ikut membantu bersama Kesbangpol seperti NGO kemudian dari OPD lainnya termasuk juga bantuan dari kementerian atau lembaga seperti BNPT, Densus melalui Satgaswilnya di Jawa Tengah itu pun bekerjasama membantu dengan anggaran mereka masing-masing dan sasaran kerja mereka masing-masing sehingga capaian kinerja yang diharapkan dalam pencegahan Radikalisme dan Terorisme di Jawa Tengah menjadi lebih maksimal.</p> <p>Perpres No. 7 dikeluarkan/diterbitkan untuk memperkuat kinerja. Pergub No. 35 dimunculkan oleh NGO untuk memperkuat dan mempererat serta menyadarkan OPD atau lembaga-lembaga lain bahwa pencegahan Radikalisme, Ekstrimisme dan Terorisme di Jawa Tengah bukan tanggung jawab 1 atau 2 pihak. Dengan adanya Pergub itu masing-masing pihak sadar akan tanggung jawab seperti contohnya Dinas Pendidikan dan OPD lainnya.</p> <p>Selama ini penganggulangan Radikalisme dan Terorisme itu hanya dilimpahkan pada Kesbangpol atau lembaga keamanan. Dengan adanya Pergub itu semua jadi sadar bahwa pencegahan Radikalisme, Ekstremisme dan Terorisme harus dimulai dari hulunya terlebih dahulu seperti dari lingkup keluarga maupun pendidikan. Fungsinya Pergub itu sebagai tameng dan mensegel kalau penanggulangan Radikalisme serta terorisme itu urusan bersama dan kerja kolaboratif yang tanggung jawabnya dibagi bersama sesuai drngan tupoksinya masing-masing. Dalam pola kolaboratif ini masing-masing pihak memiliki anggarannya masing-masing, program kerjanya masing-masing dan capainnya masing-masing sehingga masing-masing pihak menjalankan programnya sesuai Rencana Aksi Daerah dari Pergub tersebut karena Pergub itu menampung hal/program pencegahan tersbeut menjadi Rencana Aksi.</p> <p>Perpres No. 7 memiliki Rencana Aksi Nasional yang terdiri dari 3 Pilar yakni Pencegahan, Badan Hukum dan Kerjasama dan Kerjasama Luar Negeri. Kewenangan Daerah hanya terdapat di Pilar 1 yakni Pencegahan. Pergub itu mengejawantahkan Pilar 1 Pencegahan menjadi 3 Sub Pilar yakni Kesiapsiagaan, Kontra Radikalisasi dan Deradikalisasi.</p>
--	--	--

10.	Pertanyaan	:	Apakah ada program-program Anti Radikalisme yang dikhususkan untuk Pemuda atau anak muda?
	Jawaban		<p>Secara khusus, mayoritas peserta yang mengikuti program-program ini kebanyakan anak muda atau pemuda. Menurut survey dari BNPT RI, tingkat keterpaparan untuk anak muda/pemuda cukup besar dan juga rentan. Mayoritas yang dilibatkan dalam program-program Anti Radikalisme itu anak-anak muda karena salah satu contohnya seperti Sekolah Damai, melibatkan 70 sekolah setingkat SMA/SMK di Jawa Tengah.</p> <p>Dalam pelatihan-pelatihan pun yang paling banyak dilibatkan anak-anak muda. Walaupun memang tidak secara khusus untuk anak muda, tapi secara tidak langsung anak muda mengambil peran yang lebih besar, bahkan dalam data statistik Kesbangpol Jateng anak muda paling banyak menerima atau mengikuti program Kesbangpol Jateng.</p>
11.	Pertanyaan	:	Apakah audiens atau sasaran peserta kegiatan termasuk yang terindikasi radikal atau tidak?
	Jawaban		Iya ada, contohnya eks napiter atau orang-orang yang terpapar radikalisme diikutkan melalui program Deradikalisasi yang berisikan kegiatan-kegiatan yang bersifat Wawasan Kebangsaan, Wawasan Keagamaan dan Kewirausahaan.
12.	Pertanyaan	:	Apakah anak-anak muda atau pemuda yang pernah menjadi radikal atau teroris menjadi sasaran peserta kegiatan pada program-program ini?
	Jawaban	:	Iya itu jelas dan pasti. Mereka menjadi peserta dalam kegiatan Program-Program Anti-Radikalisme. Badan Kesbangpol Jateng bekerjasama dengan OPD terkait maupun kelompok lainnya seperti Kelompok Tani, Ormas, Kelompok Agama, dan lain-lainnya.
13.	Pertanyaan	:	Apa hasil maupun capaian dari program-program anti radikalisme yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Jateng?
	Jawaban	:	Hasil atau capaian-capaian yang didapatkan pertama keluarnya Pergub No. 35 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme di Jawa Tengah. Ini merupakan tindaklanjut dari Perpres No. 7 Tahun 2021 Tentang RAN PE. Kemudian Pemprov Jateng mendapatkan Penghargaan RAN PE Awards dari BNPT RI di tahun 2022 pada kategori Inisiator Pelaksanaan RAN PE dan Inisiator Kolaborasi Multi Pihak. Kolaborasi Multi Pihak ini adalah kerjasama

		<p>Kesbangpol dengan Wahid Foundation, Yayasan Percik, Prasasti Perdamaian dan Aman dalam menjalankan Sekolah Damai. Di tahun 2023 menerima penghargaan sebagai Pemerintah yang berhasil menjalankan program RAN PE dari BNPT RI. Banyak isi dari Pergub No. 35 yang mengatur terkait pelaksanaan penyelenggaraan PE yang melibatkan OPD yang ada di Jateng, mengatur pula bantuan bagi saksi dan korban dari kejadian terorisme, Pengarusutamaan Gender, Pokja, dan Penghargaan.</p> <p>Hasil dan capaian yang diinginkan adalah Indeks IRT (Intoleransi, Radikalisme dan Terorisme) itu menurun persentasenya. Yang semakin dikhawatirkan adalah pola penyebarannya. Ada pergeseran pola penyebaran. Dahulu penyebaran dilakukan melalui Majelis-Majelis dan diikat dengan Baiat-Baiat. Sekarang pola penyebarannya melalui sistem pendidikan dan itu yang harus diingat.</p> <p>Di tahun 2022, informasi yang didapatkan ketika Pak Widi dan Mas Arfan mewawancarai salah satu Emir Jamaah Islamiyah yakni Abu Tholib yang berperang di Filipina mengatakan, dia menyatakan bahwa Jamaah Islamiyah tidak akan melakukan Amaliyah lagi di Indonesia. Jamaah Islamiyah merupakan pelopor tindakan Amaliyah di Indonesia dan pelaku Pengeboman Bom Bali 1 dan 2 serta Pengeboman JW Marriot dan Ritz Carlton. Setelah itu Jamaah Islamiyah melakukan evaluasi bahwa mereka menetapkan target yakni melawan kepentingan asing, tetapi ketika melakukan Amaliyah justru korbannya kebanyakan dari Indonesia. Setelah itu mereka akhirnya berikrar menetapkan Amaliyah di negara lain seperti Suriah, Afghanistan, Irak dan lain-lain. Untuk Indonesia, Amaliyah yang dilakukan melalui jalur pendidikan dari RA (Raudhatul Athfal), TK, hingga Pendidikan Tinggi.</p> <p>Harapan paling besar Kesbangpol Jateng adalah perubahan perilaku masyarakat terhadap pemerintah dimana masyarakat menjadi lebih yakin dan percaya dengan pemerintah (terjadinya peningkatan). Dengan adanya media sosial, apa yang ada di media sosial itu menjadi suatu kebenaran tanpa dilihat dan ditelusuri kebenarannya (<i>check and recheck</i>). Harapan Kesbangpol Jateng dan pemerintah adalah masyarakat</p>
--	--	--

			merubah perilaku mereka ketika menerima berita maka harus melalukan <i>cross check</i> pada saluran-saluran yang terpercaya dan di dalam pengajian mereka dapat mencari tokoh-tokoh agama yang jelas dalam artian sanadnya jelas.
--	--	--	---

## Transkrip Wawancara dengan Peserta Program Anti Radikalisme

### Badan Kesbangpol Jateng

1.	Pertanyaan	:	Apa saja Program-Program Anti Radikalisme Badan Kesbangpol Jateng yang Anda ketahui?
	Jawaban	:	Saya ikut beberapa kali Program Anti Radikalisme terutama mengenai sosialisasi akan bahaya radikalisme. Sosialisasi dalam artian pencegahan akan radikalisme yang mana merupakan bagian dari Program Kontra Radikalisasi Badan Kesbangpol Jateng.
2.	Pertanyaan	:	Bagaimana bisa mendapatkan atau mengetahui informasi terkait Program Anti Radikalisme Badan Kesbangpol Jateng?
	Jawaban	:	Mendapatkan informasi terkait Program Anti Radikalisme dari organisasi yang saya ikuti dan organisasi tersebut mendapatkan undangan dari Badan Kesbangpol Jateng terkait sosialisasi di dalam Program Anti Radikalisme. Karena saya tertarik maka saya mengikuti programnya.
3.	Pertanyaan	:	Mengapa Anda mengikuti program Anti Radikalisme Badan Kesbangpol Jateng?
	Jawaban	:	Sebenarnya saya tertarik dengan Program Anti Radikalisme dan menurut saya jarang ada sosialisasi yang membahas terkait radikalisme dan bahayanya.
4.	Pertanyaan	:	Apakah Anda mengikuti Program Anti Radikalisme tersebut secara berkala atau tidak?
	Jawaban	:	Saya mengikuti 3 kali Program Anti Radikalisme terkhususnya Program Sosialisasi (Kontra Radikalisasi) yang diikuti.
5.	Pertanyaan	:	Apakah materi-materi yang disampaikan dalam Program Anti Radikalisme Badan Kesbangpol Jateng bervariasi?
	Jawaban	:	Menurut saya di dalam sosialisasi Program Anti Radikalisme, materi-materi yang disampaikan cukup bervariasi dan tidak sebatas materi yang diulang-ulang.
6.	Pertanyaan	:	Bagaimana Kualitas Materi yang disampaikan dalam Program Anti Radikalisme Badan Kesbangpol Jateng? a. Baik atau Tidak b. Tepat atau Tidak

	Jawaban	:	Materi-Materi yang disampaikan berisi pencegahan akan bahaya radikalisme, Pancasila dan wawasan kebangsaan serta peran pemuda dalam menanggulangi radikalisme atas nama agama untuk masyarakat secara umum. Materi-Materi yang disampaikan juga tepat terkhusus untuk saya sebagai anak muda dan kualitasnya sudah jelas bagus. Karena kedalaman materinya dan juga tidak sebatas permukaan saja pembahasannya serta lebih rinci. Tujuan sosialisasi adalah untuk pencerdasan kepada masyarakat.
7.	Pertanyaan	:	Apakah materi yang disampaikan dalam Program Anti Radikalisme Badan Kesbangpol Jateng relevan dengan kondisi saat ini?
	Jawaban	:	Materinya relevan di dalam Program Anti Radikalisme khususnya Program Kontra Radikalisasi, karena banyak pemuda-pemuda yang belum paham betul apa itu radikalisme dan mengapa bisa disalahpahami serta bahayanya jika tidak dicegah sehingga materi-materinya relevan untuk saat ini.
8.	Pertanyaan	:	Apakah Program Anti Radikalisme yang dilaksanakan Badan Kesbangpol Jateng lebih baik dilaksanakan secara luring, daring atau dua-duanya dan lebih efektif melalui mekanisme apa?
	Jawaban	:	Saya mengikuti program ini secara langsung atau luring. Terkait Program Sosialisasi Anti Radikalisme Badan Kesbangpol Jateng, saya belum pernah mengikuti secara daring. Tetapi luring lebih efektif karena informasi dan materi yang disampaikan lebih enak dan bisa diterima secara langsung.
9.	Pertanyaan	:	Apakah Program Anti Radikalisme yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol Jateng itu penting untuk masyarakat secara umum?
	Jawaban	:	Program Anti Radikalisme Badan Kesbangpol Jateng sangat penting terutama untuk masyarakat secara umum dan harus disosialisasikan.
10.	Pertanyaan	:	Bagaimana menurut Anda terkait Program Anti Radikalisme yang belum memiliki kegiatan khusus untuk anak-anak muda atau pemuda dan Apakah menurut Anda diperlukan Program Anti Radikalisme yang menarget sasaran peserta khususnya anak-anak muda atau pemuda?
	Jawaban	:	Kalau seingat saya sewaktu mengikuti Program Anti Radikalisme Badan Kesbangpol Jateng melalui undangan yang didapatkan, Program ini untuk semua organsiasi dan ormas yang ada di Kota Semarang. Jadi

			<p>tidak memandang orang tua atau pemuda. Tidak terkhusus untuk pemuda maupun orang tua karena yang diundang secara keseluruhan organisasi.</p> <p>Program Anti Radikalisme khusus pemuda atau anak muda sangat diperlukan mengingat para pemuda lebih mudah untuk menyalurkan dan menyampaikan informasi kepada orang dan lingkungan di sekitar dan lebih antusias juga disebar kepada sesama pemuda. Apalagi di berita banyak anak-anak muda yang terpapar radikalisme.</p> <p>Kegiatan pada Program Kontra Radikalisasi ini diperlukan khususnya dengan target peserta yang dikhususkan untuk anak-anak muda atau kalangan pemuda. Beberapa kegiatan sosialisasi yang diikuti tersebut justru diisi oleh tidak hanya anak-anak muda tetapi juga berbagai kalangan dari berbagai macam usia, bahkan jumlah dari kalangan yang lebih tua pun lebih banyak daripada yang lebih muda atau dari kalangan pemuda sehingga harus ada Program Kontra Radikalisasi yang memang target pesertanya khusus dari kalangan pemuda</p>
11.	Pertanyaan	:	Bagaimana Manfaat yang dirasakan dari mengikuti Program Anti Radikalisme Badan Kesbangpol Jateng?
	Jawaban	:	<p>Manfaat yang didapatkan sudah dijawab pada pertanyaan-pertanyaan sebelumnya dalam mengikuti Program Anti Radikalisme dan memang anak-anak muda menjadi kunci untuk menanggulangi radikalisme.</p> <p>Materi yang disampaikan untuk orang-orang yang pertama kali mengikuti kegiatan dari Program Kontra Radikalisasi cukup menarik dan mudah untuk dipahami, tetapi ketika secara rutin mengikuti maka kegiatan yang dilaksanakan serta materi yang diberikan menjadi monoton dan terkesan berulang-ulang</p>
12.	Pertanyaan	:	Bagaimana pendapat anda tentang peran pemuda dalam menghadapi, mencegah, dan menanggulangi bahaya radikalisme, ekstremisme dan terorisme? Apakah sangat diperlukan akan peran mereka dan apakah kolaborasi dengan kalangan pemuda itu harus sering dilakukan?
	Jawaban	:	Peran Pemuda dalam menghadapi, mencegah dan menanggulangi bahaya radikalisme, ekstremisme dan terorisme sangat penting dan diperlukan. Kalau pemuda dapat langsung berperan aktif entah dalam bentuk apapun baik di sosialisasi dan pencegahan itu sudah

			<p>sangat baik.</p> <p>Memang Program Anti Radikalisme dalam beberapa materinya masih belum dipahami secara sepenuhnya bagi para pemuda. Tetapi dalam pencegahan apalagi para pemuda ini mengikuti secara masif, mereka bisa lebih mudah menerimanya karena materinya didapatkan melalui teman sebaya mereka. Jadi peran dan kolaborasi dengan para pemuda sangat dibutuhkan.</p>
13.	Pertanyaan	:	<p>Apa yang Anda harapkan dari Program Anti Radikalisme Badan Kesbangpol Jateng? Hasilnya seperti apa dan harapan Anda kedepan terkait Program Anti Radikalisme Badan Kesbangpol Jateng?</p>
	Jawaban	:	<p>Yang saya harapkan, Badan Kesbangpol Jateng dalam menjalankan Program Anti Radikalisme dapat mencerdaskan terkait bahayanya radikalisme terhadap masyarakat umum dan masyarakat bisa terbuka mengenai sebab akibat radikalisme, penanganannya, serta pencegahannya sehingga masyarakat sebagai Rakyat Indonesia tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada radikalisme serta toleransi antar sesama umat beragama dan sesama bangsa.</p>